

---

## Analisis Anggaran Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2016-2020

Devi Yunika Mendrofa\*, M. Anshar Nur

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

[\\*devi.mendrofa@yahoo.com](mailto:devi.mendrofa@yahoo.com)

### **Abstract**

*The purpose is to analyze the regional budget for regencies/cities in South Kalimantan province. They are analyzing the inhibiting factors in the South Kalimantan province's regencies/cities' provincial budget. And analyze what government policies are increasing regional spending in regencies/cities in South Kalimantan province. The type of data is secondary data (time series). This type of research is descriptive quantitative. The results showed that the average spending variance in ten regencies/cities was favored (Favourable Variance). Expenditure growth shows eight regencies/cities positive results. Expenditure compatibility shows a balanced operating expenditure and two regencies/cities show an unbalanced category; capital expenditures show capital expenditure shows balanced expenditure, but only two regencies show a balance. Expenditure efficiency shows mixed result tend to be less efficient. The inhibiting factors in the performance of the regional budget are budget planning factors, budget execution, and human resources. The government takes policies to improve spending performance.*

**Keywords:** *Regional Expenditure; Inhibiting Factors; Regional Expenditure Budget Policies.*

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis Bagaimana anggaran belanja daerah pada kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan. Menganalisis Apa saja faktor penghambat dalam anggaran belanja daerah kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan. Dan menganalisis apa saja kebijakan pemerintah dalam meningkatkan belanja daerah kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan. Jenis data adalah data sekunder (*time series*). Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata varians belanja sepuluh kabupaten/kota disukai (*Favourable Variance*). Pertumbuhan belanja menunjukkan delapan kabupaten/kota hasil positif. Keserasian belanja menunjukkan belanja operasi yang seimbang, dan belanja modal menunjukkan belanja yang seimbang hanya dua kabupaten yang menunjukkan keseimbangan. Efisiensi belanja menunjukkan hasil beragam cenderung kurang efisien. Faktor penghambat dalam kinerja anggaran belanja daerah yaitu faktor perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan sumber daya manusia. Pemerintah mengambil kebijakan untuk meningkatkan kinerja belanja.

**Kata Kunci:** Belanja Daerah; Faktor Penghambat; Kebijakan Anggaran Belanja Daerah.

### **PENDAHULUAN**

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom dalam mengatur dan mengendalikan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap daerah wajib menyusun dan

memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Tujuannya untuk meningkatkan pelayanan publik, merevitalisasi perekonomian daerah, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan daerah.

APBD dapat dijadikan menjadi tolak ukur dalam penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah. Kinerja pemerintah sangat krusial untuk ditinjau dan diukur. Pengukuran tersebut akan berguna untuk melihat seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam satu periode tertentu dibandingkan dengan yang telah direncanakan. Karena masyarakat yang menjadi pendanaan publik melalui pembayaran pajak daerah yang dibayarkan ingin tahu apakah dana tersebut telah dikelola dan dipergunakan dengan benar, efisien, efektif, ekonomis, transparan, serta berorientasi dalam kepentingan publik.

Penganggaran berbasis kinerja memberikan gambaran yang lebih konkret tentang kemampuan suatu daerah menggali potensinya untuk meningkatkan anggaran pendapatan serta membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat. Ukuran kinerja belanja diukur dengan menggunakan alat analisis varians, pertumbuhan belanja, keserasian belanja, dan efisiensi belanja. Analisis ini dilakukan untuk menentukan perimbangan belanja yang dapat dipertanggung jawabkan oleh Pemerintah Daerah dalam memprioritaskan pendanaan untuk belanja, dan membantu menunjukkan produktivitas dan efektivitas belanja daerah yang digunakan oleh instansi pemerintah.

Oleh karena itu, analisis terhadap kinerja keuangan daerah pada provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri dari 11 kabupaten dan 2 kota dengan potensi ekonomi daerahnya yang memberikan pendapatan bagi daerah tersebut sehingga pendapatan daerah tersebut dipergunakan untuk memberikan pelayanan publik dan peningkatan barang publik daerah. Hal ini dapat memberikan informasi yang penting terkait kinerja pemerintah daerah pada periode tertentu dalam pengelolaan keuangan daerah dengan hasil yang menunjukkan kinerja yang baik atau belum serta faktor penghambat dalam kinerja anggaran belanja daerah dan kebijakan yang diambil pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja anggaran belanja yang lebih baik.

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan penelitian ini yaitu menganalisis bagaimana anggaran belanja daerah pada kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan periode 2016-2020. Untuk mengetahui apa saja faktor yang menjadi penghambat dalam anggaran belanja pada kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan. Dan mengetahui apa saja kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan anggaran belanja daerah pada kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan.

## **PENELITIAN TERDAHULU**

Oleh peneliti (Sinambela & Pohan, 2016) dengan judul “Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Pada Tahun 2010-2013” menunjukkan kinerja anggaran dan belanja daerah yang baik dan pertumbuhan pendapatan dikatakan cukup baik. Dapat dikatakan efisien dalam merealisasikan belanja

dan pertumbuhan belanja menunjukkan pertumbuhan yang positif yang diimbangi dengan pertumbuhan pendapatan.

Oleh peneliti (Karinda, Ilat, & Mawikere, 2016) dengan judul “Analisis Kinerja Anggaran Belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara” menunjukkan kinerja anggaran belanja pada tahun anggaran 2009-2012 sudah cukup baik.

Oleh peneliti (Katit & Pinatik, 2016) dengan judul “Analisis Kinerja Belanja Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat Provinsi Papua” menunjukkan kinerja anggaran belanja Kabupaten Asmat memanfaatkan anggarannya dengan baik. Dengan kata lain, realisasi anggaran berada dibawah anggaran yang telah direncanakan.

Oleh peneliti (Karlina & Handayani, 2017) dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Permerintah Daerah Dalam Pengelolaan APBD Kota Surabaya Tahun 2012-2015” menunjukkan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran belanja daerah kota Surabaya secara umum dapat dikatakan baik.

Oleh peneliti (Sahara, 2019) dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2013-2017” menunjukkan kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan secara umum masih rendah.

## METODE

Ruang Lingkup Penelitian mengukur dan menganalisis kinerja keuangan belanja daerah kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan dan menganalisis faktor yang menghambat kinerja belanja daerah serta kebijakan yang diambil pemerintah daerah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Unit Analisis yang digunakan yaitu Analisis Varians Belanja, Analisis Pertumbuhan Belanja, Analisis Keserasian belanja, Analisis Efisiensi Belanja. Dengan menggunakan Teknik Pengumpulan data sekunder yang diperoleh dalam bentuk tahunan pada Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Kalimantan Selatan, Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dan situs DJPK Kemenkeu RI.

### Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan yaitu perhitungan rumus Analisis Varians Belanja, Analisis Pertumbuhan Belanja, Analisis Keserasian Belanja, dan Analisis Efisiensi Belanja.

### *Analisis Varians Belanja*

Merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran.

Analisis Varians Belanja = Realisasi Belanja- Anggaran Belanja

Tabel 1

#### Analisis Varians Belanja

Kategori Varians Belanja	Ukuran
Favourable Variance	Realisasi Belanja < Anggaran Belanja
Unfavourable Variance	Realisasi Belanja > Anggaran Belanja

Sumber : (Mahmudi, 2016)

### ***Analisis Pertumbuhan Belanja***

Bermanfaat untuk mengetahui pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun positif atau negatif.

$$\text{Pertumbuhan Belanja } Thn_t = \frac{\text{Rea.Belanja } Thn_t - \text{Rea.Belanja } Thn_{t-1}}{\text{Realisasi Belnja } Thn_{t-1}} \times 100\%$$

**Tabel 2**  
**Analisis Pertumbuhan Belanja**

Kategori Pertumbuhan Belanja	Ukuran
Naik	Positif
Turun	Negatif

Sumber: (Mahmudi, 2016)

### ***Analisis Kerasian Belanja***

Analisis yang menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dana untuk belanja.

a. **Belanja Operasi**

$$\text{Rasio Belanja Operasi Terhadap Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

Sumber: (Mahmudi, 2016)

b. **Belanja Modal**

$$\text{Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

Sumber: (Mahmudi, 2016)

**Tabel 3**  
**Analisis Kerasian belanja**

Kategori Penilaian	Proporsi	Kategori
Belanja Operasi terhadap Total Belanja	60-90%	Jika dalam rasio yang ditentukan, dikatakan seimbang, tetapi jika lebih atau kurang dari rasio yang ditentukan, dikatakan tidak seimbang
Belanja Modal terhadap Total Belanja	5-20%	

Sumber: (Mahmudi, 2016)

### ***Analisis Efisiensi Belanja***

Merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran yang dilakukan pemerintah, untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan.

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Sumber: (Depdagri, 1997)

**Tabel 4**  
**Analisis Efisiensi Belanja**

Kategori	Ukuran
----------	--------

Sangat Efisien	< 60%
Efisien	60% - 80%
Cukup Efisien	80% - 90%
Kurang Efisien	90% - 100%
Tidak Efisien	> 100%

Sumber: (Depdagri, 1997)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Varians Belanja

**Tabel 5**  
**Hasil Analisis Varians Belanja kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan**  
**Periode 2016-2020 (Dalam Miliar Rupiah)**

Kabupaten/ Kota	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata	Kategori
Tanah Laut	-358,68	-406,49	-37,24	-70,73	-387,20	-252,07	Favourable Variance
Kotabaru	-399,64	-364,25	-474,20	-379,23	-303,57	-384,18	Favourable Variance
Banjar	-129,97	-157,14	74,35	-113,28	-286,44	-122,50	Favourable Variance
Barito Kuala	-127,57	21,33	44,91	30,09	2,31	-5,79	Favourable Variance
Tapin	-352,41	-138,52	-140,87	71,41	-146,98	-141,47	Favourable Variance
Hulu Sungai Selatan	243,94	-17,71	-56,24	253,83	-34,90	77,78	Unfavourable Variance
Hulu Sungai Tengah	-212,81	-183,22	-509,80	-91,91	-191,95	-237,94	Favourable Variance
Hulu Sungai Utara	-187,02	132,73	147,29	181,97	29,24	60,84	Unfavourable Variance
Tabalong	-191,66	19,16	-35,58	130,25	-161,86	-47,94	Favourable Variance
Tanah Bumbu	-382,20	-85,50	-71,29	58,67	-140,46	-124,16	Favourable Variance
Balangan	-35,96	154,10	-222,17	120,26	95,70	22,39	Unfavourable Variance
Banjarmasin	-214,46	-190,24	-198,98	-204,53	-328,76	-227,39	Favourable Variance
Banjarbaru	-13,12	-72,09	-7,74	-48,27	-130,83	-54,41	Favourable Variance

Sumber: Hasil Olah Data Sekunder, 2022

Berdasarkan tabel 5 diatas, Varians Belanja Daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan periode 2016-2020 menunjukkan hasil dari 13 kabupaten/kota terdapat 10 (sepuluh) kabupaten/kota yang menunjukkan varians belanja baik (*Favourable Variance*) artinya realisasi belanja tidak melebihi dari anggaran belanja atau dinilai baik, sedangkan terdapat 3 (tiga) kabupaten/kota dengan hasil varians belanja tidak baik (*Unfavourable Variance*) yang artinya terdapat realisasi belanja yang melebihi dari anggaran belanja. Kabupaten/kota yang berada dalam kategori varians

belanja baik yaitu kabupaten Tanah Laut, kabupaten Kotabaru, kabupaten Banjar, kabupaten Barito Kuala, kabupaten Tapin, kabupaten Hulu Sungai Tengah, kabupaten Tabalong, kabupaten Tanah Bumbu, kota Banjarmasin, dan kota Banjarbaru. Kabupaten/kota dengan hasil varians belanja tidak baik yaitu kabupaten Tanah Laut, kabupaten Banjar, kabupaten Barito Kuala, kabupaten Hulu Sungai Selatan, kabupaten Hulu Sungai Utara, kabupaten Balangan.

### Pertumbuhan Belanja

**Tabel 6**  
**Hasil Analisis Pertumbuhan Belanja Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan**  
**Periode 2016-2020 (Dalam Persentase)**

Kabupaten/ Kota	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata	Kategori
Tanah Laut	-	-9,69%	-13,45%	9,11%	0,38%	-2,73%	Negatif
Kotabaru	-	-3,06%	-2,80%	9,43%	-12,57%	-1,80%	Negatif
Banjar	-	-0,95%	1,56%	13,82%	-5,74%	1,74%	Positif
Barito Kuala	-	-12,72%	7,17%	6,14%	4,25%	0,97%	Positif
Tapin	-	-11,04%	3,74%	6,06%	7,50%	1,25%	Positif
Hulu Sungai Selatan	-	-9,14%	4,32%	11,84%	-5,66%	0,27%	Positif
Hulu Sungai Tengah	-	-6,45%	-11,33%	17,38%	-5,72%	-1,22%	Negatif
Hulu Sungai Utara	-	-13,96%	1,92%	9,25%	-0,50%	-0,66%	Negatif
Tabalong	-	-3,92%	1,38%	8,22%	-12,60%	-1,39%	Negatif
Tanah Bumbu	-	-4,89%	8,98%	30,19%	-3,22%	6,21%	Positif
Balangan	-	10,05%	-2,15%	10,10%	-0,25%	3,55%	Positif
Banjarmasin	-	-12,81%	8,13%	22,90%	-0,55%	3,54%	Positif
Banjarbaru	-	-13,10%	4,47%	15,74%	-4,60%	0,50%	Positif

Sumber: Hasil Olah Data Sekunder, 2022

Berdasarkan tabel 6 diatas hasil perhitungan rata-rata analisis pertumbuhan belanja kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan dari tahun 2016 sampai tahun 2020 menunjukkan 8 kabupaten/kota dengan pertumbuhan belanja positif yang artinya kinerja belanja pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan belanja daerah, sedangkan 5 kabupaten/kota lainnya dengan pertumbuhan belanja negatif berarti daerah tersebut belum mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan belanja.

### Keserasian Belanja

**Tabel 7**  
**Hasil Analisis Belanja Operasi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan**  
**Periode 2016-2020 (Dalam Persentase)**

Kabupaten/ Kota	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata	Kategori
Tanah Laut	55,12%	57,53%	65,48%	66,94%	65,28%	62,07%	Seimbang
Kotabaru	63,10%	71,52%	68,59%	62,90%	68,17%	66,86%	Seimbang
Banjar	66,35%	66,77%	67,28%	64,98%	68,73%	66,83%	Seimbang
Barito Kuala	54,17%	62,19%	60,37%	61,14%	59,73%	59,52%	Seimbang
Tapin	59,17%	66,12%	66,79%	63,37%	60,02%	63,09%	Seimbang
Hulu Sungai Selatan	59,44%	65,45%	64,76%	61,52%	68,31%	63,90%	Seimbang

Hulu Sungai Tengah	59,67%	56,52%	63,37%	63,83%	69,05%	62,49%	Seimbang
Hulu Sungai Utara	56,27%	82,96%	62,81%	62,42%	57,30%	64,35%	Seimbang
Tabalong	56,66%	59,58%	64,19%	63,00%	66,09%	61,91%	Seimbang
Tanah Bumbu	67,07%	83,33%	69,78%	59,39%	61,25%	68,16%	Seimbang
Balangan	54,34%	58,12%	62,94%	62,52%	62,17%	60,02%	Seimbang
Banjarmasin	75,55%	82,01%	78,17%	72,78%	74,46%	76,60%	Seimbang
Banjarbaru	58,33%	68,84%	72,72%	69,78%	70,59%	68,05%	Seimbang

Sumber: Hasil Olahan Data Sekunder, 2022

**Tabel 8**  
**Hasil Analisis Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan**  
**Periode 2016-2020 (Dalam Persentase)**

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata	Kategori
Tanah Laut	34,24%	31,43%	21,92%	17,38%	13,59%	23,71%	Tidak Seimbang
Kotabaru	24,74%	17,78%	16,70%	20,98%	10,11%	18,06%	Seimbang
Banjar	17,72%	14,15%	15,75%	17,76%	9,62%	15,00%	Seimbang
Barito Kuala	31,70%	18,70%	23,03%	21,17%	18,95%	22,71%	Tidak Seimbang
Tapin	28,72%	18,40%	19,55%	21,27%	25,40%	22,67%	Tidak Seimbang
Hulu Sungai Selatan	28,21%	19,62%	20,97%	24,25%	15,27%	21,67%	Tidak Seimbang
Hulu Sungai Tengah	27,07%	27,61%	19,42%	19,46%	9,57%	20,63%	Tidak Seimbang
Hulu Sungai Utara	28,89%	16,90%	18,26%	18,37%	21,36%	20,75%	Tidak Seimbang
Tabalong	31,46%	27,72%	22,94%	23,60%	15,32%	24,21%	Tidak Seimbang
Tanah Bumbu	19,73%	16,57%	16,57%	27,75%	27,95%	21,71%	Tidak Seimbang
Balangan	30,17%	26,11%	21,64%	22,00%	20,29%	24,04%	Tidak Seimbang
Banjarmasin	23,83%	17,27%	21,72%	27,16%	21,39%	22,27%	Tidak Seimbang
Banjarbaru	41,51%	30,99%	27,18%	30,10%	27,26%	31,41%	Tidak Seimbang

Sumber: Hasil Olah Data Sekunder, 2022

Berdasarkan tabel 7 dan tabel 8 menunjukkan rata-rata Belanja Operasi tahun 2016 sampai 2020 pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan seimbang (60-90%) terhadap total belanja daerah. Rata-rata hasil Belanja Modal menunjukkan kategori tidak seimbang, kecuali kabupaten Kotabaru dan kabupaten Banjar dengan hasil seimbang. Terlihat bahwa selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan sebagian besar dananya dari total belanja lebih besar untuk belanja operasi dibanding belanja modal, sehingga rasio belanja modal relatif kecil. Hal ini menunjukkan sebagian besar dari total belanja dialokasikan untuk belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu anggaran.

## Efisiensi Belanja

**Tabel 9**  
**Hasil Analisis Efisiensi Belanja Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan**  
**Periode 2016-2020 (Dalam Persentase)**

Kabupaten/ Kota	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata	Kategori
Tanah Laut	83,34%	79,94%	97,41%	95,58%	79,86%	87,23%	Cukup Efisien
Kotabaru	79,31%	80,30%	75,27%	80,64%	81,98%	79,50%	Efisien
Banjar	92,78%	91,33%	104,63%	94,41%	86,29%	93,89%	Kurang Efisien
Barito Kuala	91,20%	101,88%	103,77%	102,35%	100,17%	99,87%	Kurang Efisien
Tapin	76,97%	88,33%	88,53%	106,60%	89,40%	89,97%	Cukup Efisien
Hulu Sungai Selatan	122,53%	98,55%	95,72%	122,03%	97,44%	107,25%	Tidak Efisien
Hulu Sungai Tengah	85,52%	86,52%	67,16%	93,02%	85,74%	83,59%	Cukup Efisien
Hulu Sungai Utara	87,49%	113,37%	114,73%	116,99%	102,40%	107,00%	Tidak Efisien
Tabalong	88,66%	101,35%	97,62%	108,98%	89,51%	97,23%	Kurang Efisien
Tanah Bumbu	78,36%	93,90%	95,26%	103,24%	92,79%	92,71%	Kurang Efisien
Balangan	96,94%	114,01%	84,67%	109,77%	107,65%	102,61%	Tidak Efisien
Banjarmasin	87,55%	87,36%	87,72%	89,52%	84,09%	87,25%	Cukup Efisien
Banjarbaru	98,86%	93,22%	99,26%	96,13%	89,73%	95,44%	Kurang Efisien

Sumber: Hasil Olah Data Sekunder, 2022

Berdasarkan tabel 9 menunjukkan hasil perhitungan efisiensi belanja pada kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan periode 2016-2020 beragam. Terdapat 1 (satu) kabupaten yang termasuk dalam kategori efisien (60-80%) yaitu kabupaten Kotabaru. Dalam kategori cukup efisien (80-90%) terdapat 4 (empat) kabupaten/kota yaitu kabupaten Tanah Laut, kabupaten Tapin, kabupaten Hulu Sungai Tengah dan kota Banjarmasin. Kabupaten/kota yang termasuk dalam kategori kurang efisien (90-100%) ada 5 (lima) yaitu kabupaten Banjar, kabupaten Barito Kuala, kabupaten Tabalong, kabupaten Tanah Bumbu, dan kota Banjarbaru. Dan kabupaten yang termasuk dalam kategori tidak efisien (>100%) yaitu kabupaten Hulu Sungai Selatan, kabupaten Hulu Sungai Utara, dan kabupaten Balangan.

Dapat dilihat bahwa kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan kinerja yang kurang efisien dalam melakukan penghematan anggaran belanja mencapai 90-100%. Hal ini dikarenakan APBD kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan lebih banyak untuk belanja operasional yang keuntungannya habis dikonsumsi daripada belanja modal untuk pelayanan publik seperti infrastruktur, irigasi, dan aset lainnya. Kondisi tersebut belum dapat dikatakan ideal karena semestinya belanja modal dapat ditingkatkan dan belanja operasi (pegawai dan barang) diturunkan. Dengan meningkatnya belanja modal diharapkan dapat mempercepat peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

### **Faktor Penghambat Kinerja Belanja**

Faktor penghambat dalam kinerja belanja daerah pada kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, faktor perencanaan anggaran, faktor pelaksanaan anggaran, dan sumber daya manusia. Pertama, faktor penganggaran. Dalam faktor penganggaran hal yang menjadi penghambat yaitu penetapan Perda APBD yang terlambat, ketidaksesuaian antara rencana kegiatan yang telah dituangkan dengan alokasi anggaran yang ditetapkan pada DIPA, dan penyesuaian struktur alokasi belanja. Kedua, faktor pelaksanaan anggaran. Dalam faktor pelaksanaan hal yang menjadi penghambat yaitu ketersediaan dana yang tidak tepat waktu dan pemotongan anggaran. Ketiga, faktor sumber daya manusia. Dalam faktor ini hal yang menghambat yaitu perubahan regulasi terhadap struktur organisasi, kualitas sumber daya manusia, dan mutasi pegawai.

### **Kebijakan Pemerintah Meningkatkan Kinerja Belanja**

Dengan adanya faktor penghambat dalam kinerja anggaran maka pemerintah daerah mengambil kebijakan untuk meningkatkan kinerja belanja daerahnya. Pertama, melakukan peningkatan pengetahuan penyelenggaraan pemerintah di daerah mengenai mekanisme pengelolaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Kedua, dalam penyusunan anggaran harus menyiapkan rencana kegiatan. Ketiga, pemerintah daerah dapat secara optimal dan efektif menggunakan kekuatan fiskal atau anggaran yang dimiliki pada tahun anggaran untuk mendanai kegiatan, program dan proyek untuk tahun anggaran tersebut. Keempat, menerapkan kebijakan pelaksanaan transfer ke daerah sesuai dengan hasil penyerapan anggaran dan belanja di daerah. Kelima, dengan mengintegrasikan pengelolaan pendapatan daerah, pengelolaan belanja daerah serta pengelolaan aset dan kekayaan daerah untuk menghilangkan implikasi pola koordinasi. Keenam, meningkatkan pengetahuan (*knowledge*) aparatur/pegawai dengan mengikutsertakan SDM dalam bintek ataupun diklat yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Ketujuh, menerapkan kaderisasi pegawai pengelolaan anggaran untukantisipasi kedepan jika terjadi mutasi pegawai.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pertama, kinerja anggaran pemerintah daerah yang ditinjau dari analisis anggaran belanja menunjukkan kinerja anggaran belanja daerah berdasarkan varians belanja terdapat 10 (sepuluh) kabupaten/kota dengan kinerja yang baik dikarenakan rata-rata hasil negatif yang menunjukkan adanya penghematan penggunaan realisasi anggaran dan 3 (tiga) kabupaten/kota dengan kinerja tidak baik dikarenakan rata-rata hasil positif yang berarti belum adanya penghematan penggunaan realisasi anggaran. Kinerja anggaran belanja daerah berdasarkan pertumbuhan belanja menunjukkan 8 (delapan) kabupaten/kota kinerja yang bersifat positif dan 5 (lima) kabupaten pertumbuhan belanja negatif. Kinerja anggaran belanja daerah berdasarkan keserasian belanja menunjukkan pemerintah daerah dalam menggunakan aktivitas anggarannya dialokasikan untuk belanja yang manfaatnya habis

di konsumsi dibandingkan belanja modal sehingga rasio belanja modal relatif lebih kecil. Kinerja anggaran belanja daerah berdasarkan efisiensi belanja secara rata-rata menunjukkan hasil efisien pada 1 (satu) kabupaten, terdapat 3 (tiga) kabupaten/kota dalam kategori cukup efisien, kategori kurang efisien terdapat 5 (lima) kabupaten/kota dan terdapat 3 (tiga) kabupaten dalam kategori tidak efisien.

Kedua, faktor penghambat dalam kinerja belanja yaitu perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan sumber daya manusia. Ketiga, kebijakan pemerintah yang diambil untuk meningkatkan kinerja belanja daerah yaitu melakukan peningkatan pengetahuan penyelenggara pemerintah di daerah mengenai mekanisme pengelolaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja), dalam penyusunan anggaran harus menyiapkan rencana kegiatan, pemerintah daerah dapat memanfaatkan secara optimal dan efektif seluruh kekuatan fiskal atau anggaran yang dimiliki di satu tahun anggaran bersangkutan, menerapkan kebijakan pelaksanaan transfer ke daerah sesuai dengan hasil penyerapan anggaran dan belanja di daerah. Mengintegrasikan pengelolaan pendapatan daerah, pengelolaan belanja daerah serta pengelolaan aset dan kekayaan daerah untuk menghilangkan implikasi pola koordinasi yang tidak bersinergi terhadap perubahan organisasi perangkat daerah. Kemudian meningkatkan pengetahuan (*knowledge*) aparatur/pegawai dengan mengikutsertakan SDM dalam bintek atau pun diklat yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan menerapkan kaderisasi pegawai pengelolaan anggaran untuk antisipasi kedepan jika terjadi mutasi pegawai.

### **Implikasi Penelitian**

Implikasi dari hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa kinerja anggaran belanja daerah berdasarkan varians belanja menunjukkan sepuluh kabupaten/kota dengan kinerja keuangan belanja yang baik (*Favourable variance*) dan terdapat tiga kabupaten/kota dengan kinerja keuangan tidak baik (*Unfavourable Variance*). Diharapkan untuk kabupaten/kota dengan kategori baik dapat mempertahankan capaiannya sedangkan untuk kabupaten/kota dengan kategori tidak baik agar dapat memperbaiki pengelolaan anggaran daerahnya. Pertumbuhan belanja menunjukkan delapan kabupaten/kota pertumbuhan positif, yang artinya bahwa kinerja belanja pada kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan belanja daerahnya. Dan lima kabupaten/kota menunjukkan pertumbuhan belanja negatif. Keserasian belanja menunjukkan pemerintah daerah sebagian besar dananya dialokasikan dari total belanja lebih besar untuk belanja operasi dibanding dengan belanja modal. Efisiensi belanja daerah menunjukkan hasil bervariasi terlihat ada satu kabupaten yang termasuk dalam kategori efisien, empat kabupaten/kota termasuk dalam kategori cukup efisien, lima kabupaten/kota dalam kategori kurang efisien dan tidak efisien, jika kurang efisien maka anggaran tersebut terjadi defisit kecil dan terdapat tiga kabupaten dalam kategori tidak efisien. Jika dihubungkan dengan faktor penghambat maka kinerja belanja dipengaruhi oleh faktor perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan sumber daya manusia. Dan kemudian muncullah kebijakan pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja anggaran belanja tersebut.

## Saran

Pertama, disarankan agar melakukan penghematan anggaran belanja yang akan dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan. Serta mencari dan mengali potensi sumber pendapatan lain agar terciptanya varians belanja dengan penghematan anggaran belanja yang baik. Kedua, disarankan agar dapat menyeimbangkan pertumbuhan belanja daerah antara pendapatan dan belanja daerahnya. Agar terciptanya pertumbuhan belanja daerah yang positif. Ketiga, disarankan agar dapat menciptakan keserasian belanja daerah antara belanja modal dan belanja operasi berdasarkan proporsi yang sudah ditetapkan. Hal ini dilakukan agar terciptanya keserasian belanja modal dan belanja operasi yang seimbang. Keempat, disarankan agar dapat menggunakan dana belanja daerahnya dengan efisien agar dapat menghasilkan output maksimal dan efektif dalam penggunaan anggaran belanja daerah. Kelima, disarankan kepada pemerintah daerah khususnya daerah kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan untuk meminimalisir faktor penghambat dengan kebijakan yang tepat dan cepat dalam menyelesaikan faktor penghambat kinerja anggaran belanja daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Depdagri. (1997). *Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan*. Diambil kembali dari Kepmendagri No.690.900.327,1996.
- DJPK Kemenkeu. (t.thn.). Dipetik Juni 23, 2022, dari [djpk.kemenkeu.go.id](https://djpk.kemenkeu.go.id/): <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?tahun=2015&provinsi=16&pemda=11>
- Halim, A. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah* (Revisi ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- JDIH BPK RI. (2019, Maret 12). *PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Dipetik Agustus 30, 2021, dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019>
- Karinda, C. Y., Ilat, V., & Mawikere, L. (2016). *Analisis Kinerja Anggaran Belanja pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara*.
- Karlina, A., & Handayani, N. (2017, Maret). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam pengelolaan APBD Kota Surabaya Tahun 2012-2015. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, VI.
- Katit, F. X., & Pinatik, S. (2016). *Analisis Kinerja Belanja Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat Provinsi Papua*.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (3 ed.). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, M. (2009). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mahsun, M. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* (3 ed.). Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. (2005). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Negeri, K. D. (2020, Desember 30). *Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020*. Dipetik Agustus 29, 2021, dari JDIH BPK RI: BN.2020/No.1781, [kemendagri.go.id](https://kemendagri.go.id) : 5 hlm

- Negeri, K. D. (2020, Desember 30). *Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020*. Dipetik Agustus 29, 2021, dari JDIH BPK RI: BN.2020/No.1781,kemendagri.go.id : 5 hlm
- Sahara, G. F. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2013-2017. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 2, 789-803.
- Selatan, B. P. (t.thn.). Dipetik June 6, 2022, dari <https://kalsel.bps.go.id>
- Sinambela, E., & Pohan, K. R. (2016, Maret). Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis*, 16.